



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN
2021**

**KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022**



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia serta perkenan-Nya, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 yang merupakan amanat konstitusional dapat diselesaikan.

Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini dibuat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Yang mana Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Ruang lingkup laporan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, antara lain:

- a. Capaian kinerja makro;
- b. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
- d. Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. Inovasi daerah.

Gambaran kinerja tahun ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Sudah pasti dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja pada tahun 2021, akan kami jadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan kinerja pada tahun mendatang. Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat konstruktif, sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kami ke depan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya, seraya berharap, semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Kepulauan Selayar, senantiasa memperoleh petunjuk serta ridha Allah SWT.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Benteng, 31 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



H. MUH. BASLI ALI

I. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD. LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai ruang lingkup, penyusunan, dan penyampaian LPPD, LKPJ, dan RLPPD, pelaksanaan EPPD, dan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Secara astronomis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara $5^{\circ}42' \sim 7^{\circ}35'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}15' \sim 122^{\circ}30'$ Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gugusan pulau yang terletak di ujung selatan Jazirah Sulawesi yang secara administratif menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan sebagaisalah satu kabupaten dan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari Pulau Sulawesi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar;
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km² dimana luas daratan 1.357,03 km², sedangkan luas laut 9.146,66 km², dengan panjang garis pantai 670 km.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perubahan yang kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi atas, 3 Staf Ahli Bupati, 3 Asisten Sekretaris Daerah, 9 Bagian pada Sekretariat Daerah dan 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 18 Dinas, 4 Lembaga Teknis Daerah dan 11 Kecamatan.

Dalam hal produk hukum yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun 2021 telah dihasilkan produk hukum daerah yang terdiri dari 8 Peraturan Daerah, 80 Peraturan Bupati, dan 684 Keputusan Bupati. Sementara itu jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai akhir tahun 2021 sebanyak 3.615 orang.

III. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Tabel 1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1	2		3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	67,38	67,76	0,56
2	Angka Kemiskinan	Persen	12,48	12,45	-0,24
3	Angka Pengangguran	Jiwa	1.702	2.011	15,37
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,78	4,02	144 %
5	Pendapatan Per kapita	Juta Rupiah	46,73	49,57	6,01
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	-	0,357	0,354	-0,84

Sumber Data : BPS Nasional dan BPS Kepulauan Selayar 2021

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 67,38 pada tahun 2020, angka tersebut meningkat menjadi 67,76 pada tahun 2021. angka indeks pembangunan manusia telah mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 0,57 pada tahun 2021, ini dikarenakan meningkatnya sejumlah indikator pembentuk IPM seperti Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Pendidikan (Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) yang menunjukkan semakin membaiknya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat. Fakta ini membuktikan bahwa kinerja pembangunan manusia Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat.

b. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non- Makanan (GKNM). Perhitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perbedaan.

Angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 sebesar 12,45 % mengalami penurunan sebesar 0,03% dibanding tahun 2020 yang sebesar 12,48 %.

c. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 sebesar 1.702 Jiwa dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 18,16 % menjadi 2.011 Jiwa. Hal ini karena di tahun 2021, terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang masif (baik tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten). Sehingga membuat pemerintah mengeluarkan peraturan untuk pembatasan aktifitas ekonomi masyarakat (membatasi jam operasi pelaku usaha). Dan anjuran sosial distancing, sehingga dari segi demand masyarakat akan barang dan jasa mengalami penurunan, berimbas pada usaha masyarakat yang sebagian besar berstatus informal juga ikut terhenti karena turunnya permintaan.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh potensinya baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi sektoral dalam pembentukan

PDRB secara keseluruhan yang memberikan informasi tentang komposisi per sektor yang memberi andil pada perekonomian daerah. Kontribusi suatu sektor dapat meningkat secara normal, namun menurun secara persentase. Oleh sebab itu, untuk keperluan analisis, angka persentase distribusi sektoral menjadi lebih penting.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 (angka sangat sementara) sebesar 4,02% atau mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar -1,78%. Hal ini disebabkan Pertumbuhan positif terjadi di semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori transportasi dan perdagangan. Untuk kategori lapangan usaha yang memiliki peranan besar di perekonomian seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; konstruksi dan perdagangan juga mengalami percepatan/tumbuh di atas 3 %.

e. Pendapatan Per Kapita

PDRB Perkapita adalah Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Pendapatan Perkapita pada tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020, Pendapatan perkapita meningkat seiring dengan meningkatnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar.

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Perubahan gini ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami kenaikan menunjukkan ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk meningkat.

Berdasarkan data BPS tingkat ketimpangan pendapatan penduduk kepulauan selayar tahun 2021 yang diukur oleh Rasio Gini adalah 0,354, menurun 0,03 poin dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,357. Terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Kepulauan Selayar dari Tahun 2020 0,357 menjadi 0,354 untuk Tahun 2021. Turun 0,003 poin. Seperti diketahui, distribusi pendapatan makin merata jika nilai gini rasionya mendekati 0. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gini rasionya makin mendekati satu.

IV. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR;

Tabel 2
Capaian Indikator Kinerja Hasil Pada Urusan Pelayanan Dasar
Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KET.
A	URUSAN PENDIDIKAN		
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,60%	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,04%	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	60,98%	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	81,76%	
B	URUSAN KESEHATAN		
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,096 %	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	72,44 %	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	71,49 %	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	86,22 %	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	57,29 %	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,41 %	
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	56,73 %	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	91,99 %	

NO.	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KET.
C	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	78,73 %	Beluma ada update Data Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) untuk tahun 2021
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0 %	WS tidak ada yang merupakan kewenangan kabupaten (kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan) melainkan kewenangan pemerintah pusat (PermenPUPR 4 Tahun 2015)
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,45 %	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	5,94 %	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	10,35 %	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	0 %	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	56,61 %	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	7,3 %	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0 %	Tidak ada karena belum ada tenaga pengawas bersertifikat
D	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0 %	
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	Tidak Ada Data karena Tidak Ada Lahan untuk Relokasi Program dan tidak ada data rumah yang terdampak relokasi program pemerintah.

NO.	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KET.
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0,76 %	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	17,95 %	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	46,49 %	
E	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	60 %	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	10.880 jiwa	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	105.179 jiwa	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	0 %	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	89,06 %	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,01 %	
F	SOSIAL		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	21,72 %	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	97,79 %	

V. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA;

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat setiap tahun melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah sebagai konsekuensi penyerahan beberapa kewenangan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan atas LPPD yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Mendagri melalui Gubernur. Dari hasil penetapan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh Pemerintah Daerah tersebut Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahun

menunjukkan hasil kinerja yang semakin meningkat. Hal tersebut tercermin dari hasil penilaian EPPD tahun 2018 yang menetapkan Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk dalam kategori Pemerintah Kabupaten dengan status **kinerja Tinggi (T)** dengan **skor 2.9870**. Untuk penilaian EPPD tahun 2019 dan 2020 belum ada hasil yang dikeluarkan dari Tim EPPD Kemendagri RI.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK atas Laporan Keuangan)

Tabel 3
Opini BPK atas Laporan Keuangan

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja	Capaian Kinerja
			Tahun 2021	Tahun 2021
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Status	WTP LKPD 2020	WTP LKPD 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator yaitu dengan capaian WTP Telah mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi dari tahun 2021 mencapai opini WTP BPK RI LKPD tahun 2020, dari target WTP dengan persentase 100%. Capaian ini dikategorikan (Baik). Pada tahun 2021 Opini BPK atas Laporan Keuangan yaitu WTP LKPD tahun 2020 opini BPK atas laporan keuangan diperoleh dari Hasil Audit BPK RI terhadap LKPD tahun 2020. Realisasi Indikator dari Tahun 2016-2020 mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan hal tersebut telah mencapai target.

Raihan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 kali sejak tahun 2016-2020 merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk itu, ke depannya, prestasi ini harus terus menerus dipertahankan dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD, sehingga publik dapat mengakses informasi yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

VI. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Gambaran kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 merupakan gambaran keuangan *unaudited* (sebelum keluarnya hasil audit oleh BPK). Gambaran ini terdiri atas target dan realisasi keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021.

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun 2021 pada Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 1.052.156.438.623,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.024.368.383.734,84 dengan capaian realisasi sebesar 97,36%, adapun realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kelompok pendapatan dan jenis-jenis pendapatan sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 69.153.493.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.54.956.201.151,84 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 79,47%. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2021

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH		69.153.493.000,00	54.956.201.151,84	(14.197.291.848,16)	79,47
1	PAJAK DAERAH	10.560.782.000,00	9.627.712.505,00	(933.069.495,00)	91,16
2	RETRIBUSI DAERAH	2.568.372.000,00	1.916.197.000,00	(652.175.000,00)	74,61
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.916.250.000,00	8.610.923.377,48	(2.305.326.622,52)	78,88
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	45.108.089.000,00	34.801.368.269,36	(10.306.720.730,64)	77,15

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

2. Pendapatan Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.931.780.059.623,00 dan terealisasi sebesar Rp.924.244.895.283,00 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 99,19%. Adapun realisasi Dana Perimbangan Daerah Tahun 2021 tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5
Realisasi Dana Perimbangan Daerah 2021

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
PENDAPATAN TRANSFER		931.780.059.623,00	924.244.895.283,00	7.535.164.340,00	99,19
A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		875.286.987.623,00	881.462.549.641,00	(6.175.562.018,00)	100,71
1	Dana Perimbangan	768.679.307.623,00	774.854.869.641,00	(6.175.562.018,00)	100,80
2	Dana Insentif Daerah (DID)	21.085.165.000,00	21.085.165.000,00	0,00	100,00
3	Dana Desa	85.522.515.000,00	85.522.515.000,00	0,00	100,00
B. Pendapatan Transfer Antar Daerah		56.493.072.000,00	42.782.345.642,00	13.710.726.358,00	75,73
1	Pendapatan Bagi Hasil	32.100.000.000,00	31.692.345.642,00	407.654.358,00	98,73
2	Bantuan Keuangan	24.393.072.000,00	11.090.000.000,00	13.303.072.000,00	45,46

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.51.222.886.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.45.167.287.300,00 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 88,18 %. Adapun realisasi Pendapatan Lain-lain Daerah yang sah untuk Tahun 2021 tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6
Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah Tahun 2021

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		51.222.886.000,00	45.167.287.300,00	6.055.598.700,00	88,18
1	Pendapatan Hibah	7.635.400.000,00	7.340.400.000,00	295.000.000,00	96,14
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	43.587.486.000,00	37.826.887.300,00	5.760.598.700,00	86,78

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.1.117.645.394.615,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.023.520.529.850,50 dengan capaian realisasi sebesar 91,58%, adapun realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudit disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2021

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
Belanja Daerah		1.117.645.394.615,00	1.023.520.529.850,50	94.124.864.764,50	91,58
Belanja Operasi		746.185.737.803,00	696.515.962.801,00	49.669.775.002,00	93,34
1	Belanja Pegawai	395.980.896.014,00	388.642.494.866,00	7.338.401.148,00	98,15
2	Belanja Barang dan Jasa	295.461.313.557,00	265.189.139.446,00	30.272.174.111,00	89,75
3	Belanja Hibah	38.999.790.232,00	35.351.199.489,00	3.648.590.743,00	90,64
4	Belanja Bantuan Sosial	15.743.738.000,00	7.333.129.000,00	8.410.609.000,00	46,58
Belanja Modal		213.523.759.812,00	169.226.990.286,00	44.296.769.526,00	79,25
1	Belanja Modal Tanah	2.531.500.000,00	1.778.655.299,00	752.844.701,00	70,26
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.959.129.758,00	59.718.471.630,00	3.240.658.128,00	94,85
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.579.166.046,00	33.830.974.656,00	15.748.191.390,00	68,24
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	98.333.964.008,00	73.778.890.701,00	24.555.073.307,00	75,03
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	120.000.000,00	119.998.000,00	2.000,00	100,00
Belanja Tidak Terduga		2.800.000.000,00	2.799.387.174,50	612.825,50	99,98
1	Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000,00	2.799.387.174,50	612.825,50	99,98
Belanja Transfer		155.135.897.000,00	154.978.189.589,00	157.707.411,00	99,90
1	Belanja Bagi Hasil	1.500.000.000,00	1.344.635.355,00	155.364.645,00	89,64
2	Belanja Bantuan Keuangan	153.635.897.000,00	153.633.554.234,00	2.342.766,00	100,00
Surplus/(Devisit)		(65.488.955.992,00)	847.853.884,34	(66.336.809.876,34)	(1,29)

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

1. Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.746.185.737.803,00 dan terealisasi sebesar Rp.696.515.962.801,00 dengan capaian realisasi sekitar 93,34%.
2. Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.213.523.759.812,00 dan terealisasi sebesar Rp.169.226.990.286,00 dengan capaian realisasi sekitar 79,25%.
3. Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.799.387.174,50 dengan capaian realisasi sekitar 99,98%.
4. Belanja Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.155.135.897.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.154.978.189.589,00 dengan capaian realisasi sekitar 99,90%.

c. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 terdiri atas 2 komponen yaitu penerimaan pembiayaan yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komponen kedua yaitu Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas penyertaan modal daerah, adapun realisasi pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kelompok pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 8
Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
Pembiayaan Daerah					
Penerimaan Pembiayaan		67.488.955.992,00	67.601.373.624,07	(112.417.632,07)	100,17
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.488.955.992,00	67.488.955.992,07	(0,07)	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	112.417.632,00	(112.417.632,00)	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100
1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100
Pembiayaan Netto		65.488.955.992,00	65.601.373.624,07	(112.417.632,07)	100,17
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		0,00	66.449.227.508,41	(66.449.227.508,41)	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

VII. INOVASI DAERAH

1. “GERAKAN SATPOL.PP MENDUKUNG GERAKAN MEMBANGUN DESA MANDIRI DI KAB. KEP. SELAYAR (GASPOLPP MENDUKUNG GERBANG SARI)”, Inovasi ini bertujuan demi Terwujudnya Percepatan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Desa sebagai sebuah Aksi Inovasi untuk mendukung adanya Gerakan Membangun Desa Mandiri dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (dengan Lokus di Wilayah Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar), Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Tingkat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
2. “SISTEM LAYANAN INFORMASI TERPADU INVESTASI DAERAH (SELAYARTA INDAH)”, Inovasi ini bertujuan untuk memberikan Informasi

- kepada para Calon Investor terkait potensi dan peluang investasi Kepulauan Selayar berbasis online.
3. “SATU DESA 1 BANK SAMPAH”. Inovasi ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk Memaksimalkan penanganan dan pengurangan sampah.
 4. “SEJAM LAYANAN KELAR (SELAYAR)”. Inovasi tersebut diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik dan lebih cepat mulai dari proses verifikasi berkas permohonan sampai pada penerbitan dokumen kependudukan melalui dukungan berkas yang sudah lengkap.
 5. “SELAYAR INVESTMENT DAY (SID)”. Inovasi Ini merupakan Event Promosi Investasi Khusus Selayar yang diselenggarakan dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi serta menjual project investasi kepada para calon investor dalam negeri dan asing.
 6. “MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) SELAYAR”. Inovasi ini bertujuan sebagai Wadah atau tempat berlangsungnya aktifitas pelayanan publik atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi di Selayar yang merupakan perluasan fungsi pelayanan daerah serta pelayanan BUMN/BUMD/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik.
 7. “POS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN TERPADU TANADOANG (POSTER TANADOANG)” Inovasi Poster Tanadoang atau Pos Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu Tanadoang yang merupakan langkah terobosan dan inovasi penguatan sistem pelayanan kesehatan hewan terintegrasi yang melibatkan stakeholder dan pemangku kepentingan terkait peternakan dan kesehatan hewan. Poster Tanadoang merupakan inovasi yang keberadaannya dapat memberikan solusi untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan hewan yang lebih baik kepada peternak dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Hewan yang terintegrasi berbasis masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait dalam membantu peternak mengidentifikasi dan melaporkan penyakit ternak serta untuk meningkatkan mutu pelayanan guna mewujudkan pembangunan peternakan dan kesehatan ternak yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kehadiran Poster Tanadoang sebagai bentuk program Inovasi dari sebuah produk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang diterima oleh masyarakat memegang peranan yang strategis dalam rangka mewujudkan good governance di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. “SI-GESITT SILAJARATTA”. Inovasi ini menyediakan data infrastruktur pada website SI-GESITT SILAJARATTA yang dapat akses secara publik dan secara internal di lingkungan OPD terkait. Stakeholder terkait dimudahkan dengan tersedianya peta atau informasi yang mudah diakses dan dianalisis untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan secara kewilayahan level legislatif dan eksekutif, disisi lain Masyarakat umum dapat mengakses informasi perencanaan infrastruktur yang dibangun atau yang akan dibangun serta Masyarakat dan Pemerintah sampai tingkat desa dapat memberikan informasi kondisi riil infrastruktur di wilayahnya masing-masing dengan sistem informasi yang dibangun.
9. “APLIKASI PENSIUN (SIMPOLE)”. Inovasi ini bertujuan Terwujudnya digitalisasi dokumen pensiun dengan penerapan aplikasi layanan pensiun secara online sehingga proses pengurusan berkas pensiun menjadi cepat dan tepat, Terwujudnya proses pengusulan pensiun yang tepat dan cepat bagi semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Terwujudnya pelayanan penertiban SK pensiun PNS yang optimal dengan penggunaan Sistem Teknologi Informasi Pensiun Online
10. “APLIKASI E-PANGKAT” Inovasi ini bertujuan Terwujudnya digitalisasi dokumen kenaikan pangkat dengan penerapan aplikasi layanan kenaikan pangkat secara online sehingga proses pengusulan berkas menjadi cepat dan tepat, Terwujudnya proses pengusulan kenaikan pangkat yang tepat dan cepat bagi semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Terwujudnya pelayanan penerbitan SK kenaikan pangkat yang optimal dengan penggunaan Sistem Teknologi Informasi Kenaikan Pangkat Online
11. “APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PRODUK KEPEGAWAIAN BERBASIS ELEKTRONIK (SISUKSES)” dengan tujuan Mempermudah memperoleh informasi berkaitan dengan dokumen kepegawaian sehingga evaluasi dan monitoring pelaksanaan penyelesaian dokumen pegawai dapat real time dan akurat, Mengurangi Human Error dalam pelaksanaan pemantauan proses penyelesaian dokumen kepegawaian

VIII. PENGHARGAAN YANG DIRAIH PADA TAHUN 2021

1. Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Ini merupakan opini WTP yang ke 5 kalinya berturut-turut;
2. Penghargaan TPAKD Award kategori Kabupaten Pendorong Pembiayaan Kepada Sektor Unggulan Terbaik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 (enam) Sulawesi, Maluku dan Papua.

3. Penghargaan PINISI SULTAN AWARD 2021 kategori Kabupaten Penggiat Perdagangan Terbaik I (satu) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kerja sama dengan Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.
4. Penghargaan ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender.

IX. PENUTUP

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah komitmen bersama untuk melayani, memberdayakan dan membangun masyarakat. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus bekerja keras dalam mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar kearah peningkatan kesejahteraan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Benteng, 31 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



H. MUH. BASLI ALI